

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang merupakan sekumpulan obat yang dapat mempengaruhi kerja tubuh terutama pada kerja otak. Narkoba digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun penggunaan narkotika pada saat ini tidak hanya untuk kepentingan tersebut melainkan sudah mejadi alat konsumsi pribadi atau dengan kata lain penyalahgunaan narkoba. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba yang tanpa izin dan tidak memiliki hak menggunakan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang sangat merugikan bagi penggunanya. Menurut data yang dikutip dalam BNNP DIY dampak penyalahgunaan narkoba meliputi dampak fisik, psikologis, sosil dan ekonomi. Dampak fisik yakni adanya kerusakan atau gangguan pada sistem saraf (*neorologis*) seperti berhalusinasi, mengalami kejang-kejang serta ganggguan pada kesadaran diri. Dampak psikologis yakni kemampuan berpikir menjadi tidak normal, berperasaan cemas atau was-was, serta mengalami ketergantungan obat. Kemudian dampak sosial dan ekonomi yakni merugikan masyarakat baik dalam ekonomi, sosial kesehatan maupun hukum.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan permasalahan yang harus dituntaskan. Maka dari itu untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dibutuhkan pembentukan lembaga khusus untuk menangani permasalahan tersebut. Pada tahun 1971 pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Intruksi

presiden tentang penanggulangan bahaya narkoba dan membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden. Dalam menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat, Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.

Kemudian Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN kemudian dirubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebagai sebuah lembaga forum, BNN bertugas mengkoordinasikan satker-satker tertentu dari instansi pemerintah terkait serta kewenangan operasional yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu: mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Kemudian pada tahun 2009 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden serta diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. BNN terdiri dari BNN di tingkat pusat, BBN di tingkat Provinsi (BNNP) dan BNN di tingkat Kabupaten/Kota (BNNK).

Angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir tidak ada satupun daerah atau

wilayah yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, bahkan sudah menjangkau pada semua lapisan masyarakat. Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan kebijakan strategis nasional P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Kemudian peraturan tersebut di instruksikan diberbagai BNNP seluruh indonesia tanpa terkecuali BNNP DIY. BNNP DIY dibentuk pada tanggal 20 April 2011 yang ditandai dengan dilantiknya Kepala BNNP DIY serta berdasarkan keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategis Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) bertujuan mengentaskan penyalahgunaan dan peredaran narkoba sehingga terwujudnya Indonesia negeri bebas narkoba yang memiliki empat pilar utama yakni: pertama pencegahan yang meliputi advokasi, iseminasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat. Kedua pemberdayaan masyarakat yang meliputi penguatan pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan moral). Ketiga rehabilitasi serta keempat pemberantasan peredaran Narkoba.

Kebijakan tersebut dibentuk pada tahun 2011 dan diharapkan terealisasi pada tahun 2015 “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”. Namun sangat disayangkan kasus narkoba atau penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut data BNN yang dilansir dalam kompas.com (2016) pada tahun 2016 terdapat 807 kasus narkoba dengan 1238 tersangka yang terdiri dari 1227 WNI dan 21 WNA, kemudian pada tahun 2017 BNN mencatat dalam jawapos.com dari Januari hingga agustus terdapat 423 kasus narkoba dengan 597 tersangka, 592 WNI dan 5 WNA. Dari

data tersebut menunjukkan tingkat penyalahgunaan serta peredaran narkoba sangat tinggi dan perlu adanya penanganan yang lebih serius.

BNNP DIY merupakan instansi vertikal yang mewakili BNN di wilayah hukum Provinsi DIY yang turut melaksanakan Instruksi Presiden dalam program P4GN. Dalam Penerapan P4GN pemerintah memberikan keleluasaan dalam menyusun rencana strategis sesuai dengan keadaan wilayah, sosial dan budaya masing-masing. Menurut data BNN yang dirilis dalam Metrotvnews.com, pada tahun 2015 Provinsi DIY mendapat peringkat ke-lima kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi sebesar yakni 2,37%. kemudian pada tahun 2016 menurut penelitian BNN dan Universitas Indonesia (UI) yang dirilis dalam okezone.com, Provinsi DIY mendapat peringkat pertama kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi sebesar 2,6% dari 3,6 juta penduduk dan sebagian besar pelaku penyalahgunaan narkoba didominasi oleh pelajar dan mahasiswa.

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa Yogyakarta menjadi Provinsi dengan kasus narkoba terbanyak khususnya dikalangan pelajar dan mahasiswa. Dengan kondisi Yogyakarta yang menjadi pusat pendidikan dan wisata sangat mendorong terjadinya peningkatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, karena Yogyakarta merupakan miniatur Negara Indonesia dimana dari sabang sampai merauke berbondong-bondong berkunjung serta menempuh pendidikan di Yogyakarta, sehingga dapat mendorong peningkatan peredaran narkoba. Kepala Bidang Pemberantasan Narkotika BNN DIY AKBP Mujiyana dalam Prabowo (2016) mengatakan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa terdiri dari pelajar dan mahasiswa yang terdaftar sebagai warga Yogyakarta kemudian pelajar dan mahasiswa pendatang seperti Jakarta, Riau, Surabaya, Bandung serta dari daerah lainnya.

Dengan adanya permasalahan diatas BNNP DIY memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam mengentaskan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dibutuhkan kebijakan yang strategis sehingga terwujudnya Yogyakarta bebas narkoba. Kebijakan P4GN telah dirancang pada tahun 2011 untuk menentaskan penyalahgunaan dan peredaran namun belum mampu mengentaskan permasalahan narkoba saat ini. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang bagaimana Strategi BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di DI Yogyakarta Tahun 2016.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi BNNP DIY dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di DI Yogyakarta tahun 2016?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui strategi BNNP DIY dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di DIY;
- 1.3.2. Untuk mengetahui cara pemerintah khususnya BNNP DIY dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam penyelenggaraan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
2. Bagi masyarakat, menambah pengetahuan dan wawasan terhadap strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
3. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

1.4.2. Manfaat Teoritis

1. Bagi institusi pendidikan, dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pengetahuan dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
2. Bagi studi ilmu pemerintahan, mengetahui keakuratan institusi dalam pengawasan pemerintahan dan pembentukan struktur instansi dalam kesesuaian kapasitas menjalankan tugas;

1.5. Literature Riview

Penelitian ini tentang strategi BNNP DIY dalam P4GN. Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yakobus Jaka pada tahun 2014 tentang Strategi BNN dalam Mencegah dan Memberantas Narkoba di Samarinda. Penelitian ini menjelaskan tentang strategi BNN dalam Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kota Samarinda dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi BNN Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kota Samarinda khususnya di bidang pencegahan berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang

dimiliki oleh BNN Kota Samarinda dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Namun dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kendala-kendala bagi BNN Kota Samarinda dalam menjalankan program dan kegiatannya, seperti kendala pada terbatasnya SDM dalam pelaksanaan teknis kegiatan dan masih kurangnya pengetahuan, pemahaman maupun kesadaran masyarakat untuk berkomitmen bersama dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di kota Samarinda.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tri Wulandari pada tahun 2016 tentang Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan P4GN di BNNP DIY yang terdiri tahap interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. Interpretasi yang dilakukan yaitu diseminasi informasi, advokasi, pembentukan kader anti narkoba, dan pemberdayaan kader anti narkoba. kemudian pengorganisasian, menentukan sumberdaya manusia sebagai pelaksana, anggaran dan sarana prasarana serta pihak yang terlibat dengan menyusun proposal. serta aplikasi, yaitu sosialisasi atau *FGD*, pelatihan pembentukan kader, lomba pemberdayaan sekolah bebas narkoba yang melibatkan guru dan pelajar.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Selamat Ryadi pada tahun 2013 tentang Strategi Media Komunikasi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam Mensosialisasikan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini membahas strategi untuk mensosialisasikan program P4GN dengan menggunakan media komunikasi sebagai alat untuk menyebarkan informasi. media yang digunakan adalah media luar ruang, media massa dan internet. Sasaran dari sosialisasi adalah yaitu; mahasiswa, pelajar, PNS, dan pegawai swasta yang menekankan pencegahan dan rehabilitasi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hotmaulina Maria pada tahun 2015 tentang Strategi Komunikasi BNN Provinsi Riau Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini membahas tentang strategi komunikasi pelaksanaan P4GN yang dilakukan oleh BNNP Riau. Penyusunan strategi komunikasi memperhatikan empat faktor yaitu: mengenali sasaran komunikasi, media komunikasi yang dipilih, pengkajian tujuan pesan komunikasi, serta peranan komunikator dalam komunikasi. Teknik komunikasi yang dilakukan oleh BNN yaitu teknik komunikasi persuasif, kemudian BNN membentuk strategi kerjasama dan kaderisasi dalam lingkungan pelajar dan mahasiswa.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rusti Aisya Dilliana pada tahun 2016 tentang Peran Konseling Panti Rehabilitasi dalam Menangani Pemuda Korban Narkoba dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi (Studi Pada Panti Sosial Pamardi Putra, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, melalui wawancara yang mendalam, observasi, studi pustaka, online, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan *open coding* dan *axial coding*, kemudian menggunakan triangulasi sumber data. Dalam penelitian ini menemukan dua temuan inti yaitu peran konseling yang dilakukan konselor menghasilkan temuan penelitian berupa fungsi konseling. Fungsi konseling tersebut adalah fungsi konseling dalam menciptakan kenyamanan dan fungsi konseling sebagai *role model*, namun untuk fungsi konseling sebagai *role model* dibagi menjadi dua jenis yaitu fungsi konselor sebagai orang tua dan fungsi konselor sebagai teman. Penelitian ini juga menjelaskan beberapa kendala yang terjadi dalam proses konseling yang berlangsung. Kemudian faktor konseling mampu menjelaskan implikasi peran konseling terhadap ketahanan pribadi.

Penelitian-penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus yang akan diteliti. Penelitian ini akan membahas tentang strategi BNNP DIY dalam pelaksanaan P4GN serta aspek strategi yang ditekankan dalam penelitian ini adalah kolaborasi antar internal lembaga pemerintahan dan atau dengan lembaga eksternal seperti lembaga masyarakat sipil, NGO, Ormas, dan lainnya yang relevan.

1.6. Landasan Teori

Dalam penelitian ini tentang strategi BNNP DIY dalam P4GN menggunakan dua teori, yakni teori strategi dan teori peran.

1.6.1. Teori Strategi

1.6.1.1. Pengertian Strategi

Strategi secara etimologi berasal dari kata *stratego* yang dalam bahasa Yunani terdiri dari kata *Stratos* yang berarti Tentara dan *ego* yang berarti pemimpin. Sedangkan dalam strategi sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dapat diartikan strategi merupakan alat dalam kemiliteran guna mencapai sebuah tujuan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia untuk menjelaskan strategi dapat dijelaskan dalam hal siasat perang, ilmu siasat, dan rencana cermat terkait kegiatan yang ingin dicapai.

Ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang pengertian strategi. Menurut Itami dalam Harriyadi (2009) Strategi adalah kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan yang ditentukan dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan aktivitas, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan yang diinginkan oleh perusahaan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak dijalankan. Kemudian menurut Salusu dalam Harriyadi (2009) menerangkan bahwa strategi adalah suatu seni

menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk sasarnya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Bracker dalam Heene (2010) mengatakan bahwa strategi dapat dikaitkan dengan posisi suatu organisasi di dalam lingkungannya dan upaya penggunaan sarana-sarana organisatoris untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi. kemudian menurut Mintzberg dalam Heene (2010), konsep strategi mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu: 1). Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya; 2). Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi apapun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan organisasi; 3). Sudut pemosisian yang dipilih organisasi saat memunculkan aktivitasnya; 4). Suatu perspektif menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya, yang menjadi tapal batas bagi aktivitasnya; 5). Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesain ataupun oposan.

Menurut Harriyadi (2009) strategi merupakan suatu siasat atau rencana yang disusun dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi serta dilaksanakan dengan tindakan yang konsekuen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian Menurut Stoner, Freeman, dan Gibert Jr dalam Olivia (2017) mengatakan bahwa strategi dapat dilihat dalam dua perspektif yaitu perspektif organisasi yang ingin lakukan kemudian perspektif organisasi pada akhir yang lakukan. Pada perspektif pertama, dimaksudkan adalah sebuah penentuan capain tujuan organisasi untuk melaksanakan atau mengimplementasikan misi organisasi. Kemudian perspektif kedua, didefenisikan sebuah tindakan atau tanggapan organisasi terhadap lingkungan. Kemudian menurut Steiner dan Miner dalam Alwahdi (2010)

strategi adalah peletakan misi dan sasaran organisasi dalam menyatukan kekuatan eksternal dan internal, pembuatan kebijakan dan strategi tertentu agar dapat tercapainya suatu sasaran dalam pengimplemantasiannya tepat sasaran sesuai dengan tujuan organisasi.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara atau pola serta langkah yang terstruktur dan terencana untuk digunakan sebagai acuan dalam mencapai sebuah tujuan organisasi.

1.6.1.2. Manfaat Manajemen strategis

Peran manajemen strategis sangatlah membantu dalam kemajuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Hapsa (2013) dalam penerapannya manajemen strategi memiliki dua manfaat yaitu manfaat finansial dan manfaat non-finansial.

1. Manfaat finansial

Manajemen strategis dapat meningkatkan keuntungan profitabilitas, dan produktivitas.

2. Manfaat non-finansial

Manajemen strategis memberikan manfaat dalam menyiapkan pandangan terhadap manajemen problem, menyediakan pendekatan kooperatif, terintegrasi dan antusias untuk menghadapi masalah dan peluang, memungkinkan keputusan utama untuk mendukung tujuan yang ditetapkan, memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk mengidentifikasi peluang, serta menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal.

1.6.1.3. Tahapan Manajemen Strategi

Menurut Siagian dalam Putra (2014) mengatakan bahwa melihat suatu strategi organisasi memiliki beberapa tahapan yakni: analisis lingkungan, analisis isu strategis dan perumusan strategis.

1. Analisis Lingkungan

Dalam merespon keefektifan terhadap perubahan lingkungan, organisasi publik memiliki lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berguna dalam pengembangan strategi efektif serta mengkaitkan kedua lingkungan tersebut.

Lingkungan internal bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, kemudian lingkungan eksternal untuk mengetahui peluang dan tantangan. Keberadaan kedua lingkungan tersebut menjadi pijakan dalam analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*) untuk merumuskan tahapan analisis strategis. Analisis lingkungan internal dilakukan terhadap: a). Sumber data yang dimiliki yakni sumberdaya manusia, dana, sarana, fasilitas, struktur dan budaya organisasi; b). Strategi yang sedang digunakan dalam mengelola input; c). Kinerja yang dicapai saat ini. Kemudian analisis lingkungan eksternal dilakukan terhadap: a). Pemantauan terhadap ragam kecenderungan dan kekuatan politik sosial dan teknologi, fisik dan pendidikan; b). Mengamati *stakeholder* luar yang berpengaruh pada *client, costumers*, dan para pembuat kebijakan; c). Mengamati *competitor* dan *collaborators* yang ada.

Dengan adanya analisis lingkungan internal dan eksternal, akan terlihat peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dari organisasi serta dapat mengidentifikasi isu yang dihasilkan sehingga melahirkan suatu kebijakan strategi. Strategi kebijakan disusun memastikan bahwa : 1. Melaksanakan keputusan strategis; 2. Adanya suatu dasar pengendalian; 3. waktu yang digunakan dalam pengambilan keputusan (hemat); 4. Situasi yang sama ditangani dengan konsisten.

2. Analisis Isu Strategis

Analisis isu strategis merupakan puncak dari perencanaan strategis. Dalam mengidentifikasi isu strategis menggunakan pendekatan langsung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan memahami visi dan misi;
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman;
- c. Mengidentifikasi isi-isu strategis;
- d. Analisis kritikal isu strategis.

3. Perumusan Strategis

Strategi pada dasarnya merupakan respon dari tantangan-tantang yang dihadapi oleh organisasi, sehingga dalam pembuatan strategi harus berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi, kemudian dibuatlah rumusan stragegis. Dalam merumuskan strategi memiliki empat tahapan pendekatan sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi alternatif-alternatif umum yang dapat digunakan untuk menjawab isu strategis;
- b. Mempelajari kendala-kedala yang kemungkinan muncul dalam pelaksanaan alternatif;
- c. Merumuskan usulan-usulan utama yang dapat digunkan untuk mewujudkan alternatif-alternatif tersebut, sekaligus mengantisipasi kemungkinan kendala-kendala yang ada;
- d. Merumuskan kegiatan utama yang dilakukan dalam beberapa tahun kedepan.

Pengambilan keputusan dalam proses perumusan strategi menurut Winarsih dalam Hapsa (2013) terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pembuatan keputusan yaitu terletak pada kondisi ekonomi, tekanan politik, sosial, persyaratan prosedural, keterbatasan waktu, komitmen, dan sebagainya. Adapun

nilai-nilai yang dapat membantu dalam mengarahkan perilaku para pembuat keputusan sebagai berikut:

a. Nilai-nilai politik

Pengidentifikasian atau penilaian dalam penetapan alternative-alternatif kebijakan oleh pembuat keputusan atau *stakeholders* berdasarkan pada kepentingan partai politik beserta kelompok kepentingannya. Dalam pengambilan keputusan berdasar pada keuntungan politik dalam mewujudkan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan politik atau kelompok kepentingan.

b. Nilai-Nilai Organisasi

Dalam proses formulasi kebijakan khususnya birokrat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi. Dalam birokrasi seperti badan administrasi dalam mempengaruhi anggota untuk menerima dan bertindak atas nilai-nilai organisasi yang dilakukan dengan menggunakan imbalan dan sanksi. Keputusan individu mengarah pada pertimbangan keinginan dalam melihat organisasi agar tetap hidup, memperbesar program, kegiatan serta mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa.

c. Nilai-Nilai Pribadi

Nilai-nilai pribadi dapat memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan publik, yaitu nilai yang berusaha melakukan perlindungan dan perkembangan dalam suatu kepentingan untuk membentuk suatu keputusan tertentu.

d. Nilai-Nilai Kebijaksanaan

Para pembuat keputusan atau *stakeholders* menggunakan nilai-nilai kebijaksanaan untuk bertindak sesuai pada persepsi dalam kepentingan

masyarakat umum serta kepercayaan mengenai kebijakan secara moral, benar atau pantas. Dalam pengambilan atau keputusan kebijakan berdasarkan keinginan atau kepentingan umum.

1.6.1.4. SWOT

Menurut Rangkuti dalam Slamet (2017) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis didasarkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) yang dimaksimalkan, dan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) yang diminimalkan. Pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan organisasi berkaitan dengan proses pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman harus dianalisa terlebih dahulu. Fahmi dalam Slamet (2017) mengatakan bahwa Analisis SWOT dapat dilakukan dengan cara perbandingan faktor, yakni perbandingan antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Menurut Munaroh (2016) Analisa SWOT (*SWOT Analysis*) adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) yang mungkin terjadi dalam mencapai suatu tujuan dari kegiatan proyek/kegiatan usaha atau perusahaan/lembaga dalam skala yang lebih luas. Untuk keperluan tersebut diperlukan kajian dari aspek lingkungan baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal yang mempengaruhi pola strategi perusahaan/lembaga dalam mencapai tujuan. Ada dua macam lingkungan yang berpengaruh dalam analisis SWOT, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Analisis SWOT dapat menemukan potensi dari suatu organisasi untuk bisa maju dan berkembang dipengaruhi oleh bagaimana organisasi memanfaatkan pengaruh dari luar sebagai kekuatan tambahan serta pengaruh lokal dari dalam. Kemudian faktor lingkungan eksternal

mendapatkan prioritas lebih dalam penentuan strategi karena pada umumnya faktor-faktor ini berada di luar kendali perusahaan atau organisasi (*exogen*) sementara faktor internal merupakan faktor-faktor yang lebih bisa dikendalikan.

1. Faktor Internal (*Strength* dan *Weakness*)

Kekuatan adalah faktor internal yang ada di dalam perusahaan atau organisasi yang bisa digunakan untuk menggerakkan perusahaan atau organisasi ke depan. Suatu kekuatan/*strength* hanya akan menjadi keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi apabila kekuatan tersebut terkait dengan lingkungan sekitarnya, yaitu jika kekuatan itu dibutuhkan atau bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Jika pada perusahaan atau organisasi lain juga terdapat kekuatan dan kompetensi inti yang sama, maka kekuatan harus diukur dengan membandingkan kekuatan perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dengan demikian tidak semua kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipaksa untuk dikembangkan karena terkadang kekuatan itu tidak terlalu penting jika dilihat dari lingkungan yang lebih luas. Demikian pula tidak semua kelemahan dari perusahaan harus dipaksa untuk diperbaiki terutama untuk hal-hal yang tidak berpengaruh pada lingkungan sekitar.

Faktor Internal (*Strength* dan *Weakness*) antara lain meliputi:

- a. Sumber daya yang dimiliki
- b. Keuangan atau Finansial
- c. Kelebihan atau kelemahan internal organisasi
- d. Pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya (baik yang berhasil maupun yang gagal).

2. Faktor Eksternal (*Opportunities* dan *Threats*)

Peluang dapat ditemukan dengan membandingkan analisa internal yang dilakukan di suatu perusahaan (*strength* dan *weakness*) dengan analisa internal dari kompetitor lain. Sebagaimana kekuatan, peluang juga harus diranking berdasarkan probabilitas keberhasilannya, sehingga tidak semua peluang harus dicapai dalam target dan strategi perusahaan. Faktor Eksternal (*Opportunities* dan *Threats*) antara lain meliputi:

- a. Tren;
- b. Budaya, Sosial Politik, Ideologi, perekonomian;
- c. Sumber-sumber permodalan;
- d. Peraturan pemerintah;
- e. Perkembangan teknologi;
- f. Peristiwa-peristiwa yang terjadi;
- g. Lingkungan.

Sarby (2016) juga mengatakan bahwa analisis lingkungan menggunakan swot yang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dapat dikontrol adalah faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan atau dikontrol yang terdiri dari peluang dan ancaman dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

“distinguish between the factors you control, and those factors you dont control (are cannot control). is swot jargon, the factors you control are internal factors, and those you do not control are external factor. internal factors are those that you or your organisation have control over. strengths and weaknesses are internal factors. external factors are those which you or your organisation has little or no control over. opportunities and treats are external factors. helpful factors are those that assist your success. strengths and opportunities are helpful. harmful factors are those that impede or block your success. weaknesses and treats are harmful”

“yang membedakan antara faktor-faktor yang Anda kendalikan, dan faktor-faktor yang tidak Anda kendalikan (tidak dapat dikontrol) adalah jargon,

faktor-faktor yang Anda kendalikan adalah faktor internal, dan faktor-faktor yang tidak Anda kendalikan adalah faktor eksternal. faktor internal adalah faktor-faktor yang dapat dikontrol oleh Anda atau organisasi Anda. kekuatan dan kelemahan adalah faktor internal. faktor eksternal adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol oleh Anda atau organisasi Anda. peluang dan ancaman adalah faktor eksternal. faktor yang bermanfaat adalah faktor yang membantu kesuksesan Anda. kekuatan dan peluang sangat membantu. faktor-faktor berbahaya adalah faktor-faktor yang menghambat atau menghalangi kesuksesan Anda. kelemahan dan suguhan berbahaya ”

Menurut Ifediora Christian Osita, Idoko Onyebuchi R. dan Nzekwe Justina dalam Rohmani (2018) Analisis SWOT sebagai berikut:

“The SWOT analysis is one of several strategic planning tools that are used by businesses and other organizations to ensure that there is a clear objective defined for the project or venture, and that all factors related to the effort, both positive and negative, are identified and addressed. In order to accomplish this task, the process involves four areas of consideration: strengths, weaknesses, opportunities, and threats. It should be noted that, when identifying and classifying relevant factors, the focus is not just on internal matters, but also external components that could impact the success of the project”.

Analisis SWOT adalah salah satu beberapa alat perencanaan strategis yang digunakan oleh perusahaan dan organisasi lain untuk memastikan bahwa ada sebuah tujuan yang jelas didefinisikan untuk proyek atau usaha, dan bahwa semua faktor-faktor yang berhubungan dengan usaha, baik positif maupun negatif, diidentifikasi dan ditangani. Untuk menyelesaikan tugas ini, proses melibatkan empat bidang pertimbangan: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. ketika mengidentifikasi dan mengklasifikasikan faktor relevan, fokus bukanlah hal-hal yang hanya pada internal, tetapi juga komponen eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek.

Bagan 1.1.

Analisis SWOT



(Sumber : International Journal of Innovative and Applied Research dalam Rohmani (2018))

Namun Menurut Freddy Rangkuti dalam Rohmani (2018) Analisa SWOT adalah indentifikasi berbagi faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Theats*).

Tabel 1.1.

Matriks Analisis SWOT

	SW	STRENGTHS	WEAKNESS
OT		Tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan inter	Tentukan 5-10 faktor kelemahan internal
Opportunity	Tentukan 5-10 faktor peluang eksternal	Strategi SO Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Treat	Tentukan 5-10 faktor-faktor ancaman eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

(Sumber : International Journal of Innovative and Applied Research dalam Rohmani, 2018)

Menurut David (2013) penggunaan SWOT dapat di analisa dengan menggunakan matrik. Matrik SWOT merupakan suatu cara atau alat yang digunakan dalam penyusunan faktor-faktor strategi suatu organisasi dalam penggambaran peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi, dapat dilakukan dengan cara matrik. Matrik dapat menggambarkan dalam empat set kemungkinan alternatif strategis. Pertama strategi SO (*Strengths-opportunities*) yaitu strategi berdasarkan jalan pikiran organisasi yang memanfaatkan kekuatan dan peluang yang sebesar-besarnya. Kedua strategi ST (*Strengths-Threats*) yaitu strategi organisasi dalam mengatasi ancaman dengan memanfaatkan kekuatan organisasi. Ketiga strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*) yaitu strategi organisasi dalam cara mengurangi kelemahan organisasi dengan memanfaatkan peluang yang ada. Keempat strategi WT (*Weaknesses-Threats*) yaitu strategi organisasi dalam mengurangi kelemahan organisasi dan menghindari ancaman yang berdasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive*.

1.6.2. Teori Peran

1.6.2.1. Pengertian Peran

Menurut Sarwono dalam Cahyono (2008) Teori peran (*Role Theory*) adalah perpaduan antara teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Kemudian digunakan dalam ilmu sosiologi dan psikologi serta antropologi. Jika dilihat dalam dunia teater, aktor akan bermain sebagai tokoh tertentu dan diharapkan dapat melakukan seperti kondisi dan perilaku tertentu. Kemudian aktor diposisikan dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya posisi masyarakat seperti dalam teater. Dalam keadaan ini dapat dilihat

perilaku yang diharapkan tidak dapat berdiri sendiri karena berada pada kondisi yang saling berkaitan dengan yang lainnya (aktor lain).

Menurut Sarwono dalam Andriyani (2014) peran adalah suatu pandangan dalam ilmu sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap bahwa pemeran dalam kategori sosial seperti ibu, guru, dokter dan sebagainya sebagaimana besar diambil dalam kegiatan sehari-hari.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang atau lembaga yang menduduki status atau kedudukan tertentu.

1.6.2.2. Jenis jenis Peran

Menurut Biddle dan Thomas dalam Cahyono (2008) teori peran dibagi menjadi empat golongan, yaitu terkait dengan: a). pengambil bagian dalam interaksi sosial; b). Perilaku yang timbul dalam interaksi; c). Kedudukan dalam perilaku; serta d). Kaitan antar perilaku. Kemudian dalam pengambilan bagian dalam interaksi sosial dibagi menjadi dua yaitu : 1). aktor (pelaku), yaitu memperagakan perilaku seseorang; 2). target (sasaran) atau orang lain, yaitu hubungan aktor dengan orang lain. Dalam hal ini teori peran dapat digunakan untuk menganalisis antar hubungan baik dua orang ataupun lebih.

Berdasarkan pada pelaksanaan peranan Narwoko dan Suyanto dalam Sosiawati (2017) membagi peranan menjadi dua, yaitu :

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*) yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat mengharapkan pelaksanaan peranan yang dikehendaki dan peranan yang tidak bisa ditawar dan harus dilaksanakan. Peranan jenis ini seperti peranan hakim, peranan protokoler, diplomatik dan sebagainya.

2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*) yaitu cara bagaimana sehausnya suatu peran dijalankan. dalam pelaksanaannya peranan ini lebih fleksibel, disesuaikan dengan kondisi tertentu.

1.6.2.3. Aspek Peran

Menurut Scott et al. dalam Andriyani (2014) dalam memahami organisasi tentang peran-peran dalam organisasi tersebut, ada beberapa aspek penting dalam mengetahui peran yaitu sebagai berikut:

1. Peran bersifat impersonal yakni peran memposisikan diri sebagai penentu harapan;
2. Peran dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu peran diharapkan menjadi perilaku dalam pekerjaan tertentu;
3. Peran dengan pengendalian yang sulit (*role clarity* dan *role ambiguity*);
4. Peran yang menunjukkan perubahan perilaku utama yang dihasilkan dengan mempelajari dengan cepat;
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*). Peran dan pekerjaan memiliki perbedaan, namun dalam pelaksanaan pekerjaan seseorang dapat memiliki peran tidak hanya satu karakter namun melakukan beberapan peran.

Menurut teori peran (konsep, derivasi dan implikasi (Suhardono dalam Indriyani, 2014) seseorang dengan peranannya masing-masing seperti dokter mengobati pasiennya karena profesinya adalah dokter sebagaimana mestinya tugas dari seorang dokter harus mengobati pasien yang mendatangnya. Perilaku ini ditentukan pada peran sosial.

1.6.2.4. Peran dan Fungsi Pemerintah

Menurut Hidayat dalam Sosiawati (2017) peran dan fungsi pemerintah secara umum memiliki berbagai peranan, sebagai berikut :

1. Fungsi Pengaturan (Regulasi)

Fungsi pengaturan (regulasi) merupakan fungsi pemerintah dalam membuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Fungsi regulasi atau pengaturan ini terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah membuat peraturan perundang-undangan. Namun disamping itu, fungsi dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, lembaga-lembaga departemen maupun lembaga non-departemen. Lembaga-lembaga dapat bersinergi atau berkolaborasi satu sama lain dalam mencapai target.

2. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi pemberdayaan dilakukan setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan yang lainnya. Pemberdayaan dari aspek politik adalah upaya penyadaran kepada masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat melalui pendidikan politik. Pada dasarnya, fungsi pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat disegala bidang kehidupan.

3. Fungsi Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan terdiri dari *civil servis* dan *public servis*. *Civil service* sudah pasti dilaksanakan oleh pemerintah dan *public servise* dapat

dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan swasta maupun dilaksanakan oleh pihak swasta sendiri. *Civil servis* merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai warga Negara tanpa memandang kelas sosial ataupun besaran imbalan yang diberikan.

Adapun jenis-jenis pelayanan sebagai berikut:

a. Menjamin Keamanan Negara

Pemerintah mempunyai tugas untuk menciptakan keamanan bagi seluruh rakyatnya dan fungsi pemerintah menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan sehingga masyarakat hidup dengan rasa aman dan tenang.

b. Menjamin Ketertiban

Fungsi ketertiban merupakan usaha untuk mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat dan memberikan jaminan bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan berlangsung secara damai. Perwujudan fungsi pemerintah dalam hal ini yakni dengan adanya lembaga kepolisian, disamping peran birokrasi dan masyarakat

c. Menjamin Penerapan Keadilan

Adanya fungsi regulasi adalah menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Peraturan hukum yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan dengan adil dan tidak memihak, sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dalam Susiowati (2017) semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Maka dari itu dijadikan acuan dalam merapkan hukum yang adil, tidak memandang status sosial maupun latar belakang seseorang.

d. Pekerjaan Umum Dan Pelayanan

Pekerjaan umum dan pelayanan merupakan Bidang pekerjaan yang tidak dilakukan oleh lembaga non-pemerintah atau bidang-bidang yang lebih baik dilakukan oleh pemerintah. Wujud tugasnya adalah membangun jalan, menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lainnya.

e. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan kesejahteraan sosial yakni pencapaian masyarakat yang adil dan makmur, dan mewujudkan kesejahteraan sehingga untuk melaksanakan upaya yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan pemerintah melakukan program dan kebijakan sosial.

f. Menerapkan Kebijakan Ekonomi

Dalam hal ini pemerintah bertugas untuk menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, misalkan mengendalikan inflasi, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru, memajukan perdagangan domestik dan internasional, serta dengan kebijakan-kebijakan lain yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat;

g. Memelihara Sumber Daya Alam/Lingkungan

Pemerintah dalam pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan berbagai fungsi, baik dalam regulasi, pemberdayaan maupun pelayanan. Dalam hal ini pemerintah membentuk suatu kebijakan atau aturan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Purwaningsih dalam Susiowati (2017), dalam melaksanakan peran dan fungsi pemerintah dapat menggunakan instrument sebagai berikut:

- a). Provinsi-provinsi: Alokasi, Distribusi dan Subsidi; b). Subsidi; c). Produksi;
- d). pembuatan peraturan (*regulation*).

Dalam melakukan pelayanan dan pemberdayaan yang mengakibatkan terjadinya proses perubahan pada masyarakat, terdapat faktor pendorong yang menimbulkan suatu perubahan. Menurut Soerjono dalam Susiowati (2017) faktor pendorong sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan dengan budaya lain
- b. Kemajuan sistem pendidikan
- c. Adanya pengakuan hasil karya
- d. Adanya rasa toleransi (*Deviation*)
- e. Keterbukaan masyarakat
- f. penduduk yang heterogen
- g. Penerimaan masyarakat dalam bidang-bidang baru
- h. Berorientasi pada masa depan

Dalam proses perubahan tidak selamanya hanya terdapat faktor pendorong, namun proses perubahan terdapat juga faktor penghambat yaitu sebagai berikut:

- a. Lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan;
- b. Masyarakat bersikap tradisional;
- c. Tertanamnya kepentingan dengan kuat;
- d. Berkurangnya interaksi antar masyarakat;
- e. Tidak menerima hal-hal baru;
- f. Ideologis yang bersifat penghambat;
- g. Adat atau kebiasaan.

Menurut Slamet dalam Susiowati (2017) adanya faktor penghambat dalam proses perubahan sosial adalah sebagai kekuatan pengganggu atau kekuatan bertahan yang ada didalam masyarakat. Kekuatan bertahan adalah kekuatan yang bersumber dari bagian masyarakat yang:

- a. Menolak bentuk perubahan;
- b. Menentang tipe perubahan tertentu;
- c. Kepuasan terhadap keadaan;
- d. Sumber perubahan bukanlah hal yang tepat;
- e. Kekurangan atau tidak tersedianya sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan yang diinginkan.

Adapun hambatan sebagai kekuatan pengganggu sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang memiliki kekuatan untuk bersaing dalam mendapatkan dukungan masyarakat lain dalam proses pembangunan;
- b. Keterlambatan dalam penerimaan perubahan oleh masyarakat;
- c. Kurangnya sumber daya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

1.7. Definisi Konsep

1.7.1. Strategi

Strategi adalah suatu cara atau pola serta langkah yang terstruktur dan terencana untuk digunakan sebagai acuan dalam mencapai sebuah tujuan organisasi.

1.7.2. Peran

Peran adalah suatu pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari lembaga yang menduduki status atau kedudukan tertentu.

1.8. Definisi Operasional

1.8.1. Strategi

Tahapan dalam strategi yaitu :

- a. Analisis lingkungan (SWOT)
- b. Analisis isu strategis
- c. Perumusan strategis

1.8.2. Peran

- a. Fungsi Pengaturan (Regulasi)
- b. Fungsi Pemberdayaan
- c. Fungsi Pelayanan

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Apabila ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi dari kegiatan penelitian.

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana dalam penelitian ini akan digambarkan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari keadaan yang dapat diamati.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini guna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan maka penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY.

1.9.3. Unit Analisa Data

Unit analisa data adalah satuan dalam subjek penelitian. Unit analisis berkaitan dengan komponen atau fokus yang akan diteliti. Unit analisis dilakukan untuk validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Dalam penelitian ini unit analisa data adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY.

1.9.4. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yaitu melalui wawancara dan observasi atau pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen ataupun arsip yang terdapat di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY. Data juga dapat diperoleh melalui jurnal-jurnal terkait, beserta dengan peraturan tertulis.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara pewawancara (penanya) berinteraksi dengan narasumber (responden) dengan bertatap muka. Dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY yaitu: Yoce Taribino,

S.Si, M.Pd selaku Kepala Subbag Perencanaan, Tri Aji selaku Staaf Bidang Pemberantasan, Nurhidayati selaku kepala seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi, dan Hery Santoso S..Psi, selaku Penyuluh narkoba ahli pertama Sie Pencegahan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY yaitu Ben Senang Galus selaku Staff Bidang Dikti Dikpora DIY, Polisi Daerah (Polda) DIY yaitu AKP Endang Sulistyandini S.Pi selaku Daur Anev Direktorat Reserce Narkoba Polda DIY. serta Lembaga Rehabilitasi Kunci Yaitu Agus Tigus selaku perwakilan Lembaga Rehabilitasi Kunci.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data dari catatan-catatan, dokumen-dokumen, buku-buku, ataupun gambar-gambar yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY.

1.9.6. Analisa Data

Analisis data pada dasarnya merupakan sebuah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga tema dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Menurut Miles dan Huberman dalam Sosiawati (2017) teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data yang menggunakan beberapa teknik seperti wawancara, observasi yang hasilnya berupa data dari pendekatan hubungan dengan subjek penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi bentuk tulisan atau *script* yang akan dianalisis.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengolahan data yang memiliki alur dan tema yang jelas (yang sudah disusun alurnya dalam tabel akumulasi tema) dalam bentuk tulisan kedalam suatu matriks sesuai tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan. Dalam penyajian data juga dilakukan interpretasi yang objektif berdasarkan temuan-temuan yang ada. Penyajian data dalam penelitian ini adalah hasil analisa dalam perumusan strategi BNNP DIY dalam bentuk analisis SWOT.

4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan berisi tentang uraian dari seluruh subkategori tema yang tercantum pada table kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan disertai dengan *quote verbatim* wawancara.